

Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah

Shinta Octy Fauziah¹, Devi Maya Sofa^{2*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia;

²Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh efektivitas audit internal terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya audit internal sebagai sarana pengawasan yang memastikan anggaran dikelola secara akuntabel sesuai dengan ketentuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan data sekunder berupa Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang didapatkan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Analisis data kualitatif dilakukan untuk melihat tingkat tindak lanjut temuan audit hingga bulan Oktober 2025, yang menandakan bahwa unit kerja meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tindak lanjut audit. Hasil penelitian atas data yang diperoleh menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di instansi pemerintah, dilihat dari peningkatan jumlah temuan audit yang telah ditindaklanjuti. Ada beberapa faktor penghambat dalam penyelesaian tindak lanjut temuan audit, yaitu kurangnya perhatian pimpinan, untuk rekomendasi yang mengharuskan adanya penambahan anggaran seringkali pengusulan anggarannya belum disetujui dalam waktu dekat, adanya pihak-pihak (kontraktor, pengawas, pihak ketiga) yang tidak bertanggungjawab, serta kurangnya koordinasi di internal unit kerja maupun antara unit kerja dengan Inspektorat Jenderal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat meningkat apabila audit internal berjalan secara efektif, independen, dan ditindaklanjuti secara konsisten. Untuk itu, instansi pemerintah perlu memperkuat kapasitas audit internal, meningkatkan koordinasi dengan unit kerja, serta mendorong budaya kepatuhan agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci

APIP; Efektivitas Audit Internal; Pengelolaan Anggaran; Tindak Lanjut

Korespondensi
Shinta Octy Fauziah
octyfauziah@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of internal audit effectiveness on budget management in government agencies. The reason for the research is based on the importance of internal audits as a means of supervision that ensures budgets are managed in an accountable manner in accordance with regulations. This research uses qualitative methods, with primary data collected through interviews with auditors and secondary data in the form of Audit Reports and Follow-up on Supervision Results obtained from the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. Qualitative data analysis was conducted to examine the level of follow-up on audit findings up to October 2025, which indicated that auditees had improved compliance in budget management, as well as to identify factors supporting and hindering audit follow-up. The results of research show that internal audits have a positive effect on the accountability of budget management in government agencies, as seen from the increase in the number of audit findings that have been followed up. Several factors hinder the follow-up of internal audit findings, including a lack of attention from the management, recommendations that require additional budgets that are often not approved shortly, irresponsible parties (contractors, supervisors, third parties), and a lack of coordination. Overall, this research confirms that budget management accountability can be improved if internal audits are conducted effectively, independently, and followed up consistently. To that end, government agencies need to strengthen their internal audit capacity, improve coordination with auditees, and encourage a culture of compliance so that budget management can be accounted for transparently and in accordance with regulations.

Keywords

Budget Management; Effectiveness of Internal Audits; Follow-up; Government Internal Supervision Apparatus

Pendahuluan

Audit internal memiliki peran penting untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Di sektor publik, audit internal bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya negara. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mengartikan audit internal sebagai kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dilandasi prinsip independensi dan objektivitas, serta dirancang untuk memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja organisasi. Audit internal juga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penerapan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola organisasi. Audit internal berperan sebagai mitra organisasi yang pelaksanaannya berfokus pada kondisi organisasi secara keseluruhan, pada kejadian saat ini dan masa depan, serta memastikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Pada konteks instansi pemerintah, audit internal dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat fungsi ini melalui keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Dengan jumlah Unit Eselon 1 sebanyak 9 unit dan Unit Kerja/Satuan Kerja sebanyak 595 Unit (sumber OM-SPAN Kementerian Keuangan), Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan hanya memiliki sumber daya auditor sebanyak 223 auditor pada inspektorat dan 13 auditor pada pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit internal di Kementerian Perhubungan, kondisi ini menyebabkan pelaksanaan audit belum dapat mencakup seluruh wilayah dengan optimal, sehingga kegiatan pengawasan menjadi terbatas.

Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas adalah keterbukaan atas fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebuah organisasi sehingga pengelolaan kegiatan pada organisasi terlaksana secara efektif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Pengelolaan

anggaran yang akuntabel tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Menurut (Zamzami, Faiz and Mukhlis, 2024) pelaksanaan audit internal di sektor publik masih menghadapi beberapa kendala seperti jumlah dan kompetensi auditor yang masih terbatas, lemahnya tindak lanjut hasil audit, serta belum optimalnya implementasi rekomendasi audit. Kondisi ini menyebabkan hasil audit belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Sementara itu, kendala utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah adalah masih rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan (Fajri, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah berjalan, tingkat akuntabilitas belum optimal di beberapa unit kerja pemerintah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara audit internal dan akuntabilitas, namun sebagian besar berfokus pada lembaga keuangan atau pemerintahan daerah, bukan pada kementerian teknis. Misalnya, penelitian oleh (Amalia, 2022) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penelitian oleh (Deviyanti and Erlina Wati, 2022) yang menunjukkan bahwa peran audit internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Selain itu, banyak penelitian yang hanya mengukur efektivitas audit dari sisi kepatuhan prosedur, bukan dari dampaknya terhadap perbaikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena berupaya menganalisis pengaruh efektivitas audit internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas penyelenggaraan jasa dalam bidang transportasi dan memiliki ratusan unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menggunakan pendekatan yang lebih terfokus pada implementasi audit dan tindak lanjut temuan.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata tentang seberapa besar peran audit internal dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian teknis yang menyelenggarakan jasa transportasi dengan unit kerja tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal, memperkuat tindak lanjut hasil audit, dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas audit internal dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kementerian Perhubungan. Penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana audit internal telah berjalan secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta bagaimana pelaksanaan audit tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tiga bulan yaitu mulai bulan Agustus hingga Oktober 2025. Informan penelitian ini dipilih dengan cara purposive sampling, yaitu melalui pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan audit internal, pengelolaan tindak lanjut dan pengelolaan anggaran (Sugiyono, 2022).

Tahapan dalam penelitian perlu disusun secara sistematis agar peneliti dapat memperoleh data yang valid, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Senada dengan itu, (Moleong, 2018) menyatakan bahwa setiap langkah dalam penelitian harus dilakukan secara berurutan dan terarah untuk memastikan hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas audit internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada unit

kerja di Kementerian Perhubungan. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai proses, kebijakan, dan perilaku yang memengaruhi pengelolaan anggaran (Moleong, 2018).

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan audit internal dan tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran pada unit kerja di Kementerian Perhubungan, yaitu salah satu kementerian teknis yang memiliki tugas penyelenggaraan jasa dalam bidang transportasi serta memiliki unit kerja sebanyak 595 unit yang tersebar di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu dari Laporan Hasil Audit (LHA), data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal. Selain itu, data pendukung juga dikumpulkan melalui pengamatan langsung atau wawancara singkat dengan auditor untuk memperkuat hasil analisis (Sekaran and Bouige, 2016).

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yang pertama, peneliti mengumpulkan data dari LHA, data TLHP, keterangan atau penjelasan dari informan terkait faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit. Kedua, dari data yang telah didapatkan akan diklasifikasikan berdasarkan periode audit, status tindak lanjut, dan unit kerja eselon satu untuk memudahkan analisis. Ketiga, peneliti melakukan analisis atas data yang telah diklasifikasikan untuk mengetahui hubungan antara efektivitas audit internal dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan saran sebagai masukan bagi unit kerja berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan dan menyederhanakan data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan. Tahap kedua adalah penyajian data, menyusun data yang ada dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menarik makna dari data yang telah tersaji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan data yang telah didapatkan merupakan data yang valid, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumen audit untuk memperoleh data yang lebih tepat serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Creswell and Poth, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan, menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah, yang terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Dari hasil pengumpulan data sekunder, telah didapatkan jumlah dan persentase TLHP yang bersumber dari dokumen surat penyampaian posisi tindak lanjut oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada seluruh unit kerja dengan klasifikasi Terbatas. Adapun tabel jumlah dan persentase TLHP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d. 2025 dengan posisi tindak lanjut sampai dengan bulan Agustus 2025

No	Unit Kerja	Temuan	Tindak Lanjut			
			Tuntas	Proses	Belum TL	Tidak Dapat TL
1	Eselon 1 A	156	139	10	7	0
2	Eselon 1 B	18	6	12	0	0
3	Eselon 1 C	1.846	1.554	222	46	24
4	Eselon 1 D	23.070	21.608	1.350	65	47
5	Eselon 1 E	4.243	3.480	729	24	10
6	Eselon 1 F	504	430	68	6	0
7	Eselon 1 G	23	22	1	0	0
8	Eselon 1 H	66	60	6	0	0
9	Eselon 1 I	972	908	54	5	5
Total		30.898	28.207	2.452	153	86

Persentase	100%	91.29%	7.94%	0.50%	0.28%
------------	------	--------	-------	-------	-------

Tabel 2. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d. 2025 dengan posisi tindak lanjut sampai dengan bulan September 2025

No	Unit Kerja	Temuan	Tindak Lanjut			
			Tuntas	Proses	Belum TL	Tidak Dapat TL
1	Eselon 1 A	156	141	13	2	0
2	Eselon 1 B	18	6	12	0	0
3	Eselon 1 C	1.874	1.874	224	55	24
4	Eselon 1 D	23.115	21.619	1.348	101	47
5	Eselon 1 E	4.243	3.479	754	0	10
6	Eselon 1 F	516	439	70	7	0
7	Eselon 1 G	23	22	1	0	0
8	Eselon 1 H	66	60	6	0	0
9	Eselon 1 I	972	919	49	0	5
Total		30.983	28.255	2.477	165	86
Persentase		100%	91.20%	7.99%	0.53%	0.28%

Tabel 3. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d. 2025 dengan posisi tindak lanjut sampai dengan bulan Oktober 2025

No	Unit Kerja	Temuan	Tindak Lanjut			
			Tuntas	Proses	Belum TL	Tidak Dapat TL
1	Eselon 1 A	156	141	15	0	0
2	Eselon 1 B	18	9	9	0	0
3	Eselon 1 C	1.874	1.578	233	39	24
4	Eselon 1 D	23.158	21.632	1.382	97	47
5	Eselon 1 E	4.275	3.480	753	32	10
6	Eselon 1 F	520	444	68	8	0
7	Eselon 1 G	23	23	0	0	0
8	Eselon 1 H	66	60	6	0	0
9	Eselon 1 I	977	920	47	5	5
Total		31.067	28.287	2.513	181	86
Persentase		100%	91.05%	8.09%	0.58%	0.28%

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, klasifikasi status tindak lanjut pada tabel di atas didasarkan pada perkembangannya, yaitu 1. Tuntas, jika seluruh rekomendasi telah dilaksanakan dan dinilai telah sesuai serta disetujui; 2. Proses, jika seluruh atau sebagian rekomendasi yang dilaksanakan beserta bukti tindak lanjutnya yang disampaikan oleh auditi belum mendapat persetujuan; 3. Belum Ditindaklanjuti, jika seluruh rekomendasi belum dilaksanakan; 4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, jika rekomendasi yang diberikan ternyata mengandung kelemahan sehingga auditi tidak dapat melaksanakan tindak lanjut.

Setelah dilakukan wawancara kepada auditor yang menangani tindak lanjut, ada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tindak lanjut, untuk faktor pendukung tindak lanjut ada pimpinan yang memiliki komitmen untuk segera melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dalam 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima, selain itu penugasan/pendelegasian tugas dari pimpinan untuk pelaksanaan tindak lanjut yang jelas, didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki etos kerja tinggi dan tidak menunda pekerjaan, serta terjalannya kerjasama dan koordinasi yg baik antar unit kerja dengan Inspektorat Jenderal dalam hal pembahasan tindak lanjut. Kemudian untuk faktor penghambat pelaksanaan tindak lanjut adalah kurangnya perhatian pimpinan, lalu untuk rekomendasi yang mengharuskan adanya penambahan kegiatan/penambahan anggaran seringkali pengusulan anggarannya belum disetujui

dalam waktu dekat, adanya pihak-pihak (kontraktor, pengawas, pihak ketiga) dalam temuan yang terkait dengan pekerjaan/belanja modal yang lari dari tanggung jawab, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi di internal unit kerja maupun antara unit kerja dengan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan ketiga tabel posisi tindak lanjut di atas, diketahui bahwa terdapat penambahan temuan selama kurun waktu Agustus s.d. Oktober 2025 dikarenakan adanya pelaksanaan Audit Kinerja pada bulan tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Temuan Audit Kinerja Bulan Agustus s.d. Oktober 2025

No	Unit Kerja	Temuan		
		Agustus	September	Oktober
1	Eselon 1 A			
2	Eselon 1 B			
3	Eselon 1 C	17	28	
4	Eselon 1 D	51	45	43
5	Eselon 1 E			36
6	Eselon 1 F		12	4
7	Eselon 1 G			
8	Eselon 1 H			
9	Eselon 1 I			5
Total		68	85	88

Jika dilihat dari total temuan, terjadi peningkatan tindak lanjut selama tiga bulan terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa unit kerja semakin responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal, yang merupakan indikator penting dari efektivitas audit. Indikator penting efektivitas audit internal ada lima, yang pertama kepatuhan terhadap standar professional contohnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Yang kedua, reaksi auditi terhadap temuan audit, bagaimana auditi menanggapi rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal dan upaya perbaikan yang membangun menunjukkan efektivitas audit internal dalam mendorong perubahan ke arah yang positif. Yang ketiga, jumlah temuan audit yang berarti juga dapat menunjukkan bahwa audit internal mampu menggali dan mengidentifikasi isu kritis yang sedang terjadi dan mempengaruhi jalannya organisasi. Yang keempat, dampak yang diberikan dari rekomendasi audit, contohnya penghematan anggaran, peningkatan pendapatan, atau penerapan manajemen risiko. Yang kelima, kepuasan dari pihak-pihak terkait dapat menggambarkan seberapa besar dampak positif yang dirasakan dari pelaksanaan audit internal (CRMS Indonesia, 2026). Efektivitas audit internal pasti memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung efektivitas audit internal antara lain kompetensi auditor yang sesuai dengan bidang pemeriksaannya, tidak adanya konflik kepentingan antara auditor dengan auditi, auditor yang patuh dengan standar audit, komunikasi yang terjalin dengan baik antara auditor dengan auditi (Saputra and Umanto, 2024). Kemudian, faktor penghambat efektivitas audit internal antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya independensi auditor, kurangnya kompetensi auditor yang bertugas, kurangnya komunikasi antara auditor dengan auditi (Nugroho, Venus and Herminda, 2025). Selain itu, terdapat faktor psikologis dalam penelitian audit internal oleh (Khelil, 2023) yaitu keberanian moral. Faktor psikologis seperti rasa berani merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk mengurangi rasa takut auditor serta menjaga diri tetap dalam prinsip independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit internal yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit (Marks, 2021). Begitu pula dengan kondisi psikologis lain contohnya motivasi, kekuatan, keinginan, dan keyakinan yang merupakan faktor-faktor dalam meningkatkan kinerja (Qasim *et al.*, 2022).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), temuan audit memiliki sifat yang rahasia serta bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Hal tersebut dilaporkan secara terpisah, dan hanya pihak tertentu atau pihak berkepentingan saja yang dapat mengaksesnya. SPKN menyatakan bahwa hasil pemeriksaan berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan subtansi dan ketidakpatuhan, sistem pengendalian internal yang tidak memadai

sehingga timbul kelemahan dalam pengendalian internal dan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Berdasarkan informasi dari auditor, masih banyak terjadi temuan berulang pada satu unit kerja maupun unit kerja lainnya dalam satu unit eselon. Dalam hal ini, peran dari Direktur Jenderal sangat dibutuhkan dalam mengarahkan para unit kerja di bawahnya agar dapat menyamakan persepsi dalam pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi supaya tidak terjadi temuan berulang.

Banyaknya temuan dalam audit kinerja, menandakan bahwa pengelolaan anggaran pada suatu unit kerja belum berjalan dengan baik/belum akuntabel. Menurut (Kementrian Keuangan Direkrotat Jenderal Kekayaan Negara, 2022) audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada kesesuaiannya dengan aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas. Berdasarkan informasi dari auditor, pengelolaan anggaran pada unit kerja belum seluruhnya memadai, jika dilihat pada saat Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan pada Semester I, Triwulan III dan Tahunan (akhir tahun) masih terdapat pencatatan yang belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang kemudian dicantumkan dalam Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat dilihat melalui kepatuhan terhadap aturan penganggaran, penyajian laporan keuangan yang transparan, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Adanya audit internal yang efektif, penyimpangan dapat diminimalkan, mekanisme pengendalian internal diperkuat, dan proses anggaran berjalan lebih akuntabel. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep bahwa audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong perbaikan tata kelola dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan utama, yaitu pertanggungjawaban, pengorganisasian, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah merupakan suatu wujud dari keterbukaan dan penyediaan informasi oleh Pemerintah kepada masyarakat atas seluruh pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada suatu periode. Penyediaan informasi yang akuntabel seharusnya memuat seluruh proses pelaksanaan keuangan dari awal perencanaan hingga evaluasi, serta tak lupa adanya pengawasan atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP secara efektif dan efisien (Anggraini, Rhamadoni and Hasymi, 2020). Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan anggaran. Faktor pendukungnya antara lain lingkungan organisasi yang bekerja secara terintegrasi dan tingkat kesadaran dan kepatuhan SDM yang tinggi (Wakman, Lukman and Irawan, 2021). Faktor penghambatnya antara lain kurangnya komunikasi yang efektif antar bidang, lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya kesadaran SDM (Fitriah, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin efektif audit internal dijalankan, semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan anggaran. Peningkatan jumlah tindak lanjut rekomendasi menunjukkan bahwa unit kerja serius memperbaiki kelemahan yang ditemukan auditor. Efektivitas audit internal juga tercermin dari ketepatan waktu pelaksanaan audit, kualitas temuan, serta relevansi rekomendasi. Sebagaimana tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada pasal 43 disebutkan bahwa (1) Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Analisis kualitatif terhadap LHA dan laporan TLHP menunjukkan bahwa audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai alat pembinaan yang membantu unit kerja memperbaiki proses penganggaran dan pelaporan. Temuan yang bersifat strategis, yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan/belanja modal, kelemahan perencanaan kegiatan, serta temuan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum sesuai dengan ketentuan, telah mendorong unit kerja melakukan perbaikan pada internalnya. Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit juga memperlihatkan bahwa audit internal memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan tata kelola. Sebagaimana tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Bagian V yang menyebutkan bahwa Tindak lanjut rekomendasi hasil audit harus segera dituntaskan dan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah rekomendasi audit yang diberikan. Pimpinan audit berperan aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi sebagai upaya perbaikan pengendalian internal yang diberikan oleh APIP.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas audit internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Audit yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara

profesional, dan didukung oleh tindak lanjut yang kuat mampu memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan mengurangi potensi penyimpangan. Hal ini sejalan dengan teori dan temuan (Husain, Khairunnisa and Sari, 2025) yang menyatakan bahwa Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan pemerintah berlangsung dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Serta penelitian oleh (Nopriyanto, 2024) yang menyatakan bahwa Audit internal merupakan elemen yang sangat penting dalam tata kelola organisasi yang baik. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai alat strategis yang dapat membantu organisasi dalam memastikan kebenaran laporan keuangan, penerapan manajemen risiko, serta memantau kepatuhan terhadap peraturan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas audit kinerja berpengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah. Efektivitas audit internal tercermin dari kepatuhan terhadap standar profesional, reaksi manajemen terhadap temuan audit, jumlah temuan audit yang signifikan, dampak bisnis dari rekomendasi audit, dan kepuasan stakeholder dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diberikan dari pelaksanaan audit internal. Hasil pengolahan data tindak lanjut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tindak lanjut maka semakin baik pula kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dari hasil wawancara terhadap auditor diketahui ada beberapa faktor yang menjadi pendukung penghambat dalam pelaksanaan tindak lanjut. Untuk faktor pendukung tindak lanjut ada pimpinan yang memiliki komitmen untuk segera melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dalam 60 (enam puluh) hari sejak LHA diterima, selain itu penugasan/pendelegasian tugas dari pimpinan untuk pelaksanaan tindak lanjut yang jelas, didukung oleh kualitas SDM yang memiliki etos kerja tinggi dan tidak menunda pekerjaan, serta terjalinnya kerjasama dan koordinasi yg baik antar unit kerja dengan Inspektorat Jenderal dalam hal pembahasan tindak lanjut. Kemudian untuk faktor penghambat pelaksanaan tindak lanjut adalah kurangnya perhatian pimpinan, lalu untuk rekomendasi yang mengharuskan adanya penambahan kegiatan/penambahan anggaran seringkali pengusulan anggarannya belum disetujui dalam waktu dekat, adanya pihak-pihak (kontraktor, pengawas, pihak ketiga) dalam temuan yang terkait dengan pekerjaan/belanja modal yang lari dari tanggung jawab, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi di internal unit kerja maupun antara unit kerja dengan Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat meningkat apabila audit internal berjalan secara efektif, independen, dan ditindaklanjuti secara konsisten. Untuk itu, instansi pemerintah perlu memperkuat kapasitas audit internal dengan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya auditor, meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas agar dalam pelaksanaan audit tidak terpengaruh dengan berbagai pihak, serta mendorong budaya kepatuhan agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan

Konflik Kepentingan

Tidak ada kemungkinan konflik kepentingan yang terkait dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Devi Maya Sofa selaku dosen pembimbing. Terimakasih kepada rekan-rekan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atas kerja sama dan dukungan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Amalia, A. (2022) *Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Anggraini, N., Rhamadoni, F. and Hasymi, I.D. (2020) 'Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta', *Public Administration Journal*, 4(1).

Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc.

CRMS Indonesia (2026) *Mengukur Efektivitas Audit Internal dalam Organisasi, CRMS Indonesia*. Available at: <https://crmsindonesia.org/publications/mengukur-efektivitas-audit-internal-dalam-organisasi/>.

Deviyanti, D.M. and Erlina Wati, N.W.A. (2022) 'Pengaruh Kualitas SDM, SIPKD, Audit Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemprov Bali', *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), pp. 290–305. Available at: <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2925>.

Fajri, R.N. (2022) *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang: Hasil Penelitian yang Dapat Digunakan sebagai Buku Referensi Penelitian Lain*. Yogyakarta: Deepublish.

Fitriah, R.N. (2025) *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Husain, F., Khairunnisa, K. and Sari, N.I.P. (2025) 'Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah', *VALUE*, 6(1), pp. 34–50. Available at: <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.1596>.

Kementerian Keuangan Direkrotat Jenderal Kekayaan Negara (2022) *Perbedaan dan Persamaan Audit Eksternal dan Audit Internal, Kementerian Keuangan Direkrotat Jenderal Kekayaan Negara*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/15774/Perbedaan-dan-Persamaan-Audit-Eksternal-dan-Audit-Internal.html>.

Khelil, I. (2023) 'Psychological Capital, Moral Courage and Internal Audit Effectiveness (IAE): A Complementary or Substitution Effect', *Managerial Auditing Journal*, 38(4), pp. 419–446. Available at: <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2022-3429>.

Marks, N. (2021) *Internal Auditors Should be Brave, The Institute of Internal Auditors*. Available at: <https://internalauditor.theiia.org/en/articles/2021/october/internal-auditors-should-be-brave/>.

Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th edn. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nopriyanto, A. (2024) 'Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik', *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.15575/jim.v6i1.41614>.

Nugroho, M.I., Venus, F.F. and Herminda (2025) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal di Jakarta Pusat'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>.

Qasim, M. *et al.* (2022) 'Examining Impact of Islamic Work Ethic on Task Performance: Mediating Effect of Psychological Capital and a Moderating Role of Ethical Leadership', *Journal of Business Ethics*, 180(1), pp. 283–295. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04916-y>.

Saputra, R.E. and Umanto, U. (2024) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Pada Instansi Pemerintah di Indonesia', *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), pp. 10205–10213. Available at: <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10433>.

Sekaran, U. and Bouige, R. (2016) *Research Methods for Business*. United Kingdom.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wakman, H., Lukman, S. and Irawan (2021) 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua', *Jurnal Renaissance*, 6(2), pp. 802–816.

Zamzami, F., Faiz, I.A. and Mukhlis (2024) *Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai Standar Audit Internal Global*. Yogyakarta: UGM Press.